

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, “*Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia*”, JEPI Vol. 16, No. 4, 2001.

..... (2002). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Alfian Lains, “*Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*”, PRISMA, No. 4, 1985.

Booth, Anne., “*Pendanaan Pemerintah Pusat Dalam Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah*”, PRISMA nomor 1 Januari 1988, hlm. 65-78.

Davey K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*”, Penerbit UIPress.

Departemen Dalam Negeri, 1991, “*Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*”, Litbang Depdagri, Jakarta.

Devas, Nick, dkk, 1989, “*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*”, Penerbit UI-Press.

Diah Lutfi Wijayanti, 2001 “*Sektor-Sektor Ekonomi Potensial dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah : DIY*”, Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Dumairy, 1991, “*Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi*”, BPFE Yogyakarta.

Firmansyah, 2001, *Modul Pelatihan Praktis Ekonometrika, Aplikasi Econometric Views 3.0*, LSKE FE UNDIP.

Gujarati, D. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Guritno Mangkoesobroto, 2001, *Ekonomi Publik*, BPFE Yogyakarta.

Hadi Sasana, 2001, “*Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten*”, Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Herman Haeruman Js, “*Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah*”, 25 Tahun PRISMA 1971-1996.

Dian Agung Lugina, 2012

Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- H. Miyasto, “*Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah*”, Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 2 (4) Oktober 1998.
- Imam Ghozali, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya WK, 1996, “*Analisa Keuangan Daerah : Pendekatan Makro, Model Program PMSS ES*”, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Kaho, 1997, “*Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*”, cetakan keempat Rajawali Press, Jakarta.
- Kuncoro Thesaurianto.(2007). *Analisis pengelolaan keuangan Daerah terhadap kemandirian Daerah*.Tesis.Semarang : PPS-Undip.
- Mardiasmo, 2002, “ *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*”
- Miller, SM dan Russek, FS, “*Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level*”, Public Finance Review, Vol. 25 No. 2, March 1997, 213-237, Sage Publications, Inc.
- “Modul : *Latihan Ekonometrika Dasar*”, Program Magister Sains, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2001.
- Mudradjat Kuncoro, “*Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan*”, PRISMA, nomor 4, 1995, Jakarta.
- Mudradjat Kuncoro, 1997, “*Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Munir, Dasril H. et al. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Musgrave R.A and Musgrave P.B, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Soepomo. (2002). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPF.
- Radianto, “*Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku*”, PRISMA nomor 3, 1997.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

-, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
-, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional.
- Richard, L.H.Tumilar, 1997, "*Otonomi Keuangan dan Ekonomi Dati II di Propinsi Sulawesi Utara*", Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rita Engleni, "*Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang*", Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2001.
- Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 1999, *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudjana. (1997). *Statistika II*. Bandung : Tarsito.
- Suahasil Nazara, "*Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia*", PRISMA, 3 Maret 1997.
- Sugiyanto, "*Kemandirian dan Otonomi Daerah*", Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No. 1 Juni 2000.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Dian Agung Lugina, 2012

Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suparmoko, 2002, "*Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*", Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suparmoko, 1994, *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek*, BPFE Yogyakarta.
- Susiyati B. Hirawan, 1987, "*Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional : Keuangan Daerah di Indonesia*", Badan Otonom Economica bekerja sama dengan LPFE-UI Jakarta.

